ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan oleh :

AHMAD NIRWAN HAKIM
07011181520006

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD NIRWAN HAKIM
07011181520006

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI DPD PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 13 Desember 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989 2001
Ketua

Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001
Anggota

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001
Anggota

Palembang, Januari 2020
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(Q.S. Ar Rad : 11)

Atas Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. **Ayah dan Ibu**
2. **Saudara – saudara**
3. **Dosen Pembimbing**
4. **Sahabat seperjuangan**
5. **Almamater kebanggaan**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Peneliaan ini dilatar belakangi kurang maksimalnya pengelolaan anggaran bantuan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahuipermasalahan tersebut teori yang digunakan adalah Teori Pengelolaan Rahardjo Adisasmitayang melihat permasalahan dari 3 Fungsi yaitu; Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaannya, anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk keseluruhan kegiatan politik dan kesekretariatan sehingga mengalami defisit angaran, dalam pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terjadi perbedaan perhitungan dalam laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh DPD PDI Perjuangan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini merekomendasikan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan lebih bisa mengatur anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak terjadi ketidaksamaan perhitungan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan partai politik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Anggaran, Bantuan Keuangan Partai Politik, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto, M.Si	**Dra. Martina, M.Si**
NIP. 196211251989121001	**NIP. 196603051993022001**

Palembang, Januari 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This study is entitled Management of the Financial Aid Budget for Political DPD PDI Perjuangan in South Sumatra Province. This research was motivated by the lack of maximum management of the PDI Perjuangan assistance budget for the South Sumatra Province 2018 Fiscal Year. The purpose of this study was to determine the management of the financial aid budget for the DPD PDI Perjuangan in South Sumatra Province. To find out the problem, the theory used is Rahardjo Adisasmita's Management Theory which sees the problem of 3 functions, they are planning, implementing and monitoring. The research method used is a qualitative research method based on the results of in-depth interviews with key informants and documentation. The results showed that the management of the financial aid budget of the DPD PDI Perjuangan in the South Sumatra Province in its implementation, the budget provided by the government was insufficient for the entire political and secretarial activities so that it experienced a budget deficit, in external supervision conducted by the Financial Audit Board there were differences in calculations accountability report provided by DPD PDI Perjuangan with the results of the examination of the Financial Audit Board. This study recommends that the DPD PDI Perjuangan in the Province of South Sumatra be more able to manage the budget provided by the government and coordinate with the Financial Audit Board so that there are no inaccurate calculations in the accountability report on the use of a political aid budget.

Keywords: Management, Budget, Financial Aid for Political Parties, DPD PDI Perjuangan in South Sumatra Province

Advisor I	*Advisor II*
Drs. Mardianto, M.Si	**Dra. Martina, M.Si**
NIP. 196211251989121001	**NIP. 196603051993022001**

Palembang, January 2020
Chairman of the Department of Public Administrasion
Faculty of Sosial and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **Analisis Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan.** Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan usulan penelitian ini. Namun berkat pertolongan dari-Nya dan dukungan dari keluarga, kendala tersebut dapat diatasi. Usulan penelitian ini disusun atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya tercinta yang telah memberikan semangat dan do'a selama ini.
3. Keluarga Brigjenpol (Purn) H. M. Zulkarnain & Hj. Ine Herlina yang telah membantu saya selama saya berkuliah di Palembang.
4. Bapak Prof. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.SOS.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unsri Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unsri yang telah memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku kuliah.
10. Seluruh karyawan/karyawati Fisip Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian.

11. Pengurus dan Anggota DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman satu angkatan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2015 yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Ahmad Nirwan Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **9**
C. Tujuan Penelitian **9**
D. Manfaat Penelitian **9**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori **10**
1. **Pengelolaan** **10**
2. **Anggaran** **11**
3. **Pengelolaan Anggaran** **13**
4. **Fungsi Anggaran Publik** **15**
5. **Bantuan Keuangan Partai Politik** **17**

B. Kerangka Teori **22**
C. Kerangka Pemikiran **26**
D. Penelitian Terdahulu **27**

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian **32**
B. Definisi Konsep **33**

C. Fokus Penelitian **33**
D. Jenis dan Sumber Data **35**
E. Informan Penelitian **36**
F. Teknik Pengumpulan Data **36**
G. Teknik Analisis Data **37**
H. Sistematika Penulisan **39**

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian **40**
1. **Sejarah Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** **40**
2. **Sejarah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (DPD PDIP)** **42**
3. **Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** **42**
4. **Tujuan Pokok dan Fungsi DPD Partai Demokasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan** **44**
5. **Struktur Organisasi dan Uraian Tugas DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan** **47**
6. **Bagan Struktural Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan** **58**

B. Hasil dan Pembahasan **59**
1. **Fungsi Perencanaan** **61**
2. **Fungsi Pelaksanaan** **67**
3. **Fungsi Pengawasan** **77**

BAB V PENUTUP

A. **Kesimpulan** **86**
B. **Saran** **87**

DAFTAR PUSTAKA **89**
LAMPIRAN **91**

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Partai PDIP 6
2. Rincian Penggunaan Bantuan Anggaran DPD Partai PDIP Tahun 2018..... 7
3. Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan UU No.2 Thn 2011 19
4. Penelitian Terdahulu..... 29
5. Fokus Penelitian 34
6. Realisasi Penggunaan Anggaran Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2018.... 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran Penelitian 26
2. Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 41
3. Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan 42
4. Bagan Struktural DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan 58
5. Skema Pengajuan Anggaran Bantuan Partai Politik 63
6. Surat Pernyataan Bantuan Keuangan Partai Politik 64
7. Skema Penyaluran Anggaran Bantuan Partai Politik 69
8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Bantuan Partai Politik 78
9. Skema Pengawasan Eksternal 80
10. Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Pedoman Wawancara 92
2. Surat Tugas Pembimbing Skripsi 94
3. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 95
4. Surat Izin Penelitian ke DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan 96
5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I 97
6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II 98
7. Data Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD PDIP Prov. Sumatera Selatan Tahun 2017 & 2018 99
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik KPU Sumatera Selatan 101
9. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan 102
10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 105
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 109
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 118

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
Dapil	: Daerah Pemilihan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PP	: Peraturan Pemerintah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
No	: Nomor
UU	: Undang - Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dirancang untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dalam satu periode, tetapi anggaran bukan merupakan suatu prediksi melainkan suatu proyeksi dan estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Perlunya suatu anggaran didalam sebuah negara untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja dalam satu periode selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam sistem negara tersebut. Anggaran dituntut dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Anggaran yang didapat nantinya akan dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa anggaran yang baik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepaturan. Salah satu unsur diatas yang paling dianggap penting dalam pelaksanaan anggaran adalah efektif. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengenal adanya perlakuan terhadap surplus dan defisit, yang artinya pelaksanaan anggaran telah dicanangkan bekerja sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, apabila target yang ditentukan

tidak tercapai sesuai realitasnya melampaui maka anggaran tersebut mengalami surplus.

Anggaran negara yang dirancang dalam satu periode oleh pemerintah digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan untuk menunjang keseluruhan program yang telah direncakan oleh setiap instansi pemerintahan. Salah satu instansi yang menggunakan anggaran negara adalah partai politik, anggaran ini bertujuan agar partai politik dapat melaksanakan komunikasi dan sosialisasi politik.

Bagi sebuah negara demokrasi, partai politik menjadi instrumen utama yang menjembatani akses politik rakyat secara legal untuk menuju dan mendapatkan kendali atas suprastruktur politik negara. Dengan adanya partai politik, jabatan-jabatan politik yang semula hanya menjadi *previllage* bagi kelompok sosial tertentu, namun menjadi bisa diakses dari, dan, oleh semua kalangan masyarakat tanpa melihat kelas dan stratifikasi sosial.

Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana komunikasi publik dengan pemerintah, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan – kegiatannya, partai politik sering terkendala anggaran sehingga pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh partai politik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 menyebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan bagi partai politik adalah sebagai penunjang kegiatan partai politik. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada setiap tahun anggaran, kegunaannya ialah untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita – cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Program bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat membantu masalah keuangan yang terjadi hampir diseluruh partai politik yang ada di Indonesia.

Tujuan pemberian bantuan anggaran tersebut memiliki dua sasaran dalam penggunaan anggaran yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasal 10 dan pasal 11, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Partai Politik

   Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60%, Pendidikan Partai Politik tersebut bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kesadarakan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, kegiatan pendidikan partai politik tersebut meliputi pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak – hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

2. Operasional Sekretariat

Operasional sekretariat dimaksudkan sisa dana yang tersisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesekretariatan partai Operasional sekretariat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Administrasi Umum, yang meliputi dana pembelian alat tulis kerja, dana pengadaan rapat internal sekretariat, perjalanan dinas.
b. Langganan Daya dan Jasa, yang meliputi dana tagihan listrik, telepon, PAM, pos/giro.
c. Pemeliharaan Data dan Arsip
d. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pemberian bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Berdasarkan perolehan suara, yang dimaksud perolehan suara adalah besaran bantuan per suara peraih kursi DPRD

Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Provinsi periode sebelumnya. Setelah harga suara diketahui, maka harga suara tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang diraih masing – masing partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai di Indonesia yang berdiri sejak 1 Februari 1999. PDI Perjuangan mendapatkan suara terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2014, berrdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh 13 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah suara terbesar yaitu 713.570 suara.

Perolehan 13 kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di peroleh dari 10 Dapil di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah keseluruhan 713.570 suara. PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan suara terbanyak dari partai lain sehingga mendapatkan anggaran terbesar dibandingkan dengan partai lainnya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan menerima bantuan keuangan dari pemerintah dengan jumlah sebesar Rp.359.639.280 per tahun. Bantuan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan setiap triwulan.

Dana bantuan yang diberikan oleh pememerintah kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan politik dan sekretariatan partai, tetapi pada kenyataannya bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik belum bisa mencukupi keseluruhan kebutuhan dalam rangka memenuhi sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan atau sekretariatan partai. Hal tersebut diketahui berdasarkan data laporan penggunaan bantuan keuangan

dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bendahara dan Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah data penerimaan dan pengeluaran anggaran bantuan keuangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 - 2018:

Tabel 1.1 Data Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2017	Rp. 359.639.280,-	Rp. 604.889.283,-
2018	Rp. 359.639.280,-	Rp. 609.139.280,-

Sumber: DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan menerima anggaran bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 359.639.280 setiap tahunnya dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit anggaran kurang lebih sekitar Rp. 245.000.000 per tahun jika keseluruhan kebutuhan dalam rangka memenuhi sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan atau sekretariatan partai terpenuhi. Berikut ini adalah rincian penggunaan bantuan anggaran DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan jika seluruh kegiatan dan kebutuhan kesekretariatan partai terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 :

Tabel 1.2 Rincian Penggunaan Bantuan Anggaran DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Kegiatan dan Kebutuhan	Jumlah Uang
1.	Pendidikan Politik	Rp. 288.288.719,-
2.	Operasional Sekretariat	
	1. Administrasi Umum	
	a. Keperluan ATK	Rp. 20.840.000,-
	b. Rapat Internal Sekretariat	Rp. 3.500.000,-
	c. Ongkos Perjalanan Dinas	Rp. 240.000.000,-
	2. Langganan Daya dan Jasa	
	a. Telepon dan Listrik	Rp. 45.839.205,-
	b. Air Minum	Rp. 4.671.356,-
	c. Jasa Pos dan Giro	Rp. 5.100.000,-
	d. Surat Menyurat	Rp. 200.000,-
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Rp. 250.000,-
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp. 450.000,-
Jumlah		Rp. 609.139.280,-

Sumber: DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk keseluruhan kegiatan pendidikan politik dan kebutuhan kesekretariatan DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan sekitar Rp. 609.139.280 dalam satu tahun anggaran sedangkan bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya sebesar Rp. 359.639.280 per tahun. Untuk menutupi kekurangan anggaran dari keseluruhan kegiatan pendidikan politik dan kebutuhan sekretariatan, DPD PDI Perjuangan

Provinsi Sumatera Selatan menggunakan dana yang bersumber dari sumber lain yang sah menurut Undang - Undang selain bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik menganalisis "Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai di DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan". Dengan alasan bahwa penerimaan dan pengeluaran anggaran pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit anggaran, dikarenakan pengelolaan anggaran pada saat pelaksanaan mengalami ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran anggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah **"Bagaimana Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan?"**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran bantuan keuangan partai politik di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran atau masukan dan berupa sumber informasi hasil – hasil pemikiran bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan terutama bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Adisasmita R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bawono, R.H. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta : Salemba Empat

Haryatmoko. 2013. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Siagian P. Siagian. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Internet :

Irene, Monica. 2017. *Tata Kelola Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik Di Indonesia (Analisis Isi terhadap Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik).*

(diakses melalui Google pada 8 Maret 2019)

Kusuma, M. Aldi Jaya. 2018. *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*

(diakses melalui Google pada 8 Maret 2019)